

**PERLAWANAN SAWITTO TERHADAP BELANDA
DI SULAWESI SELATAN PADA 1905-1906**
*THE RESISTANCE OF SAWITTO TO NETHERLANDS
IN SOUTH SULAWESI 1905-1906*

Muhammad Amir

Balai Pelestarian Nilai Budaya Sulawesi Selatan
Jalan Sultan Alauddin / Tala Salapang Km. 7 Makassar, 90221
Telepon (0411) 885119, 883748, Faksimile (0411) 865166
Pos-el: muhabpnb@yahoo.co.id
Handphone 081343797300

Diterima: 19 Januari; Direvisi: 29 Maret; Disetujui: 31 Mei 2018

ABSTRACT

This study revealed and explained the resistance of Sawitto to the Dutch East Indies government in 1905-1906. The research method used is the historical method, which explains a problem based on a historical perspective. The procedure consists of heuristics, source criticism, interpretation, and historiography in the story form. The study results showed that the resistance of Sawitto Kingdom to the Dutch East Indies government was not only based by the economic interests relating to the tax port policy, but also the political interests relating to the interference of Dutch government into the domestic affairs of Sawitto Kingdom, even directly want to master Sawitto. This was marked by the submission of a claim to Sawitto Kingdom to submit, obey, and fully comply with the Dutch government by signing a short statement (korte verklaring). Because of rejecting the claim, the Dutch government decided to attack a military offensive against Sawitto Kingdom, but the attack received resistance from Sawitto army under the leadership of La Sinrang. However, Dutch forces defeated Sawitto army at the end.

Keywords: *resistance, Sawitto, and Netherlands.*

ABSTRAK

Kajian ini mengungkap dan menjelaskan perlawanan Kerajaan Sawitto terhadap pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1905-1906. Metode penelitian yang digunakan adalah metode sejarah, yang menjelaskan suatu persoalan berdasarkan perspektif sejarah. Prosedurnya terdiri atas *heuristik*, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi dalam bentuk kisah. Hasil kajian menunjukkan bahwa perlawanan Kerajaan Sawitto terhadap pemerintah Hindia Belanda, bukan hanya dilatari oleh kepentingan ekonomi yang berkaitan kebijakan pelabuhan wajib pajak, melainkan juga kepentingan politik yang berkaitan dengan campur tangan pemerintah Belanda terhadap urusan dalam negeri Kerajaan Sawitto, bahkan ingin menguasai Sawitto secara langsung. Hal tersebut ditandai dengan diajukannya suatu tuntutan terhadap Kerajaan Sawitto agar tunduk, taat, dan patuh sepenuhnya kepada pemerintah Belanda dengan menandatangani pernyataan pendek (*korte verklaring*). Karena menolak tuntutan itu, pemerintah Belanda memutuskan untuk melancarkan serangan militer terhadap Kerajaan Sawitto, namun serangan tersebut mendapat perlawanan dari laskar Sawitto di bawah pimpinan La Sinrang. Pada akhirnya, pasukan Belanda berhasil mengalahkan laskar Sawitto.

Kata kunci: perlawanan, Sawitto, dan Belanda.

PENDAHULUAN

Kajian tentang perjuangan dalam menentang kekuasaan pemerintah kolonial Belanda di berbagai daerah telah banyak dilakukan, terutama setelah Proklamasi

Kemerdekaan Republik Indonesia. Namun, masih banyak peristiwa yang mengandung nilai patriotisme dan persatuan yang belum terungkap secara utuh hingga saat ini. Jelas, konsekuensinya adalah suatu kerugian besar bagi masyarakat. Sebab, peristiwa yang

memiliki makna sejarah itu kurang dikenal atau tidak diketahui secara luas di masyarakat. Salah satu di antaranya adalah perlawanan Kerajaan Sawitto terhadap pemerintah kolonial Belanda pada 1905-1906. Padahal peristiwa itu, merupakan suatu fakta dari mata rantai perlawanan terhadap serangan militer yang dilancarkan pemerintah kolonial Belanda di Sulawesi Selatan pada awal abad ke-20. Untuk memahami secara utuh dinamika sejarah perjuangan bangsa dalam menentang penjajahan Belanda, peristiwa itu tidak dapat diabaikan. Itulah sebabnya Presiden Pertama Republik Indonesia, Ir. Soekarno memperingatkan bahwa “hanya bangsa tahu menghargai perjuangan bangsanya dan menghormati jasa para pahlawannya yang dapat tumbuh menjadi bangsa yang besar” (Arsip NIT, No.110).¹

Selain itu, perlawanan Sawitto tersebut juga menunjukkan bahwa upaya pemerintah kolonial Belanda dalam memperluas hegemoni kekuasaan di Sulawesi Selatan, senantiasa mendapat perlawanan dari rakyat di wilayah ini, termasuk di daerah Sawitto dan sekitarnya. Kenyataan itulah yang mendasari pemerintah kolonial dalam rangka perluasan wilayah kekuasaan kolonialnya di Sulawesi Selatan, berkesimpulan bahwa satu-satunya pemecahan terhadap “keresahan” yang menyusahkan Belanda dan sudah berlangsung bertahun-tahun di daerah ini, ialah “kampanye pengamanan” atau menaklukkan secara militer, yang secara halus disebut dengan *pacifikasi politiek* (politik

¹Salah satu upaya untuk menghargai perjuangan bangsa dalam menentang penjajahan serta menghargai jasa seseorang yang pada masa hidupnya, karena terdorong oleh rasa cinta tanah air, sangat berjasa dalam memimpin suatu kegiatan yang bertujuan menentang penjajahan di Indonesia, melawan musuh dari luar ataupun telah berjasa baik di bidang politik, ketatanegaraan, kebudayaan, maupun di bidang ilmu pengetahuan yang erat kaitannya dengan perjuangan kemerdekaan dan perkembangan bangsa adalah dengan meneliti dan menulis sejarah perjuangan atau biografinya.

perdamaian).² Menurut Gubernur Sulawesi C.A. Kroesen (1903-1906) bahwa demi menegakkan dan mempertahankan kewibawaan pemerintah Belanda, serta untuk melaksanakan perubahan yang diperlukan dalam hubungan dengan para penguasa lokal, dan persetujuan terhadap tuntutan-tuntutan pemerintah Belanda harus dipaksakan, kalau perlu dengan kekerasan (Kroesen,1906:10). Hal ini, penulis memandang bahwa peristiwa tersebut patut diungkapkan dan dijelaskan serta dipahami dalam membangun kehidupan berbangsa dan bernegara.

Berdasarkan uraian singkat itu, maka yang menjadi pokok persoalan kajian ini adalah mengapa Sawitto melakukan perlawanan terhadap ekspedisi militer Belanda. Kajian ini bukan hanya bertujuan mengungkap dan menjelaskan latar belakang serta dinamika perlawanan Sawitto atas serangan militer itu, tetapi juga berbagai hal yang berkaitan dengan pendudukan militer Belanda tersebut. Persoalan-persoalan yang terkandung di dalamnya, mengacu kepada hal-hal yang berkaitan dengan sebab-musabab dan faktor-faktor kondisional yang mendasari terjadi peristiwa itu. Selain itu, kajian ini juga bertujuan meningkatkan pengetahuan dan membuka cakrawala pemikiran dalam memahami berbagai peristiwa masa lampau yang mempunyai makna sejarah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Di samping itu, juga dapat meningkatkan pemahaman dan kesadaran tentang dinamika kesejarahan perjuangan bangsa dalam menentang kekuasaan pemerintah kolonial Belanda, serta untuk kajian lebih lanjut dan mendalam, ataupun sebagai bahan informasi di kalangan masyarakat pada umumnya dalam membangun karakter dan jatidiri bangsa. Itulah sebabnya para sejarawan sering menampilkan pernyataan bahwa, studi sejarah tidak hanya

²Serupa dengan kampanye pengamanan atau tindakan militer yang dilancarkan terhadap Aceh (Harvey,1989:46). Untuk memperoleh gambaran lebih lanjut tentang Aceh, antara lain terdapat dalam karya Anthony Reid (2007) Asal Mula Konflik Aceh dari Perebutan Pantai Timur Sumatera hingga Akhir Kerajaan Aceh.

suatu dialog antara sejarawan dengan masa lalu, tetapi seharusnya dapat memberikan kemaslahatan bagi kehidupan manusia (Carr, 1986, dalam Poelinggomang, 2005:13).

Berdasarkan studi kepustakaan bahwa terdapat sejumlah kajian tentang Ajatappareng, di antaranya Abd. Latif (2012), yang mengkaji tentang Konfederasi Ajatappareng 1812-1906. Kajian ini bertujuan menganalisis dinamika politik di Konfederasi Ajatappareng, baik sebelum maupun setelah kekuasaan Inggris dan Belanda di Sulawesi Selatan. Menurutnya bahwa penaklukan pemerintah Hindia Belanda atas Sulawesi Selatan pada 1905-1906, tidak terlepas dari kebijakan politik etik untuk mensejahterakan negeri-negeri jajahan melalui pendidikan, pengairan, dan perpindahan penduduk. Kajian yang memadukan sumber lokal (*lontarak*) dengan sumber arsip ini sangat membantu dalam memahami kehidupan sosial dan budaya politik orang Bugis, terutama dinamika kesejarahan di wilayah Ajatappareng. Sementara Stephen C. Druce (2009), mengkaji secara khusus lima kerajaan yang tergabung dalam Konfederasi Ajatappareng. Sumber utama yang digunakan oleh Stephen ialah manuskrip lokal (*lontarak*) dan tradisi lisan. Ia menguraikan letak geografis masing-masing kerajaan, baik menyangkut pemukiman pada sekitar aliran sungai maupun dataran rendah yang menjadi lahan pertanian padi sawah pada masing-masing kerajaan di wilayah tersebut. Pendekatan geografi sangat membantu Stephen dalam menguraikan sistem politik dan terutama sistem ekonomi tradisional kerajaan-kerajaan di wilayah Ajatappareng.

Selain itu, terdapat pula beberapa tulisan tentang Sawitto dari aparat pemerintah kolonial Belanda, yaitu, Braam Morris yang menulis *Nota van Toelichting op het Contract, Gesloten met het Landschap Sawietto (Adjataparang) op den 30^{STEN} October 1890* dan *Nota van Toelichting bij de Korte Verklaring Geteeken en Beeedigd door den Adatoewang en de Hadatsleden van het Landschap Sawito op 27^{STEN} Mei 1908*. Kedua artikel ini memberikan informasi tentang kondisi geografis, penduduk, dan pemerintahan

Kerajaan Sawitto, namun tidak menguraikan dinamika internal dan latar belakang perlawanan Sawitto terhadap pemerintah kolonial Belanda. Di samping itu, juga terhadap sejumlah karya tulis misalnya Mattulada tentang *Sejarah, Masyarakat, dan Kebudayaan Sulawesi Selatan* (1998); Muhammad Abduh tentang *Sejarah Perlawanan Terhadap Imperialisme dan Kolonialisme di Sulawesi Selatan* (1985); Edward L. Poelinggomang tentang *Sejarah Sulawesi Selatan* (2005); dan Muhammad Arfah, dkk. tentang *Biografi Pahlawan La Sinrang Bakka Lolona Sawitto* (1986); serta manuskrip lokal (*lontarak*), di antaranya *Lontarak Akkarungeng Sawitto*, *Lontarak Akkarungeng Suppa*, dan *Lontarak Akkarungeng Alitta*. Meskipun manuskrip lokal ini memiliki kelemahan, namun di dalamnya juga terdapat sejumlah informasi yang penting, terutama menyangkut latar belakang kehidupan masyarakat dan dinamika internal Kerajaan Sawitto. Semua sumber tersebut menjadi rujukan dalam kajian ini.

METODE

Penggunaan metode dalam suatu kajian ilmiah merupakan suatu keharusan. Di dalam suatu penelitian pada hakekatnya dapat menggunakan berbagai macam cara atau metode.³ Penggunaan metode tersebut, tergantung dari jenis, persoalan, dan tujuan kajian (Sumadi, 1992:15). Sejarah sebagai bagian dari ilmu-ilmu sosial yang mengkaji peristiwa yang terjadi pada masa lampau, memiliki metode tersendiri yang disebut metode sejarah (*historical method*) yang meninjau suatu persoalan berdasarkan perspektif sejarah.

³Sebenarnya metode mempunyai hubungan erat dengan metodologi, namun dapat dibedakan antara keduanya. Menurut Sartono Kartodirdjo, bahwa metode dan metodologi adalah dua fase kegiatan yang berbeda untuk tugas yang sama. Metode adalah “bagaimana memperoleh pengetahuan” (*how to know*), sedangkan metodologi adalah “mengetahui bagaimana harus mengetahui” (*to know how to know*). Dalam kaitannya dengan ilmu sejarah, metode sejarah adalah “bagaimana mengetahui sejarah”, sedangkan metodologi adalah “mengetahui bagaimana mengetahui sejarah” (Kartodirdjo, 1992:ix; Sjamsuddin, 2007: 14).

Sehubungan dengan uraian itu, maka kajian ini termasuk penelitian sejarah. Secara tematik dapat dikategorikan sebagai sejarah lokal (Abdullah,1985:310), dengan fokus perhatian pada perlawanan Kerajaan Suppa terhadap ekspedisi militer Belanda pada 1824. Metode penelitian yang dipergunakan adalah metode sejarah (Garraghan,1957:33; Gottschalk,1986:18). Pada intinya metode penelitian sejarah ini meliputi *heuristik* (pencarian dan pengumpulan sumber), kritik (analisa sumber), interpretasi (penafsiran), dan historiografi (penulisan sejarah). Prosedur kerjanya dilakukan secara sistematis. Maksudnya, kritik dilakukan setelah data terkumpul, begitu pula interpretasi dilakukan setelah melalui tahap penilaian atau kritik sumber (Notosusanto,1978:18).

Prosedur penelitian mengikuti tahapan-tahapan kegiatan penelitian sejarah dan menyajikan dengan berpedoman pada prinsip penulisan sejarah, yaitu secara kronologis. Langkah pertama yang dilakukan adalah mencari dan mengumpulkan sumber, baik berupa dokumen dan sumber-sumber sejarah lainnya yang tersimpan pada lembaga kearsipan, maupun berupa naskah *lontarak*, surat kabar, majalah, hasil penelitian, dan sumber tertulis lainnya pada lembaga perpustakaan dan sejumlah instansi pemerintah yang bergiat dalam pendataan sejarah dan kebudayaan daerah. Sumber-sumber itu diperoleh di Arsip Nasional Republik Indonesia, Badan Perpustakaan dan Arsip Provinsi Sulawesi Selatan, Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Makassar, Balai Pelestarian Peninggalan Sejarah dan Purbakala Makassar.

Selain melakukan penelusuran sumber di Jakarta dan Makassar, juga dilakukan penelitian di kabupaten-kabupaten dalam wilayah Ajatappareng di Provinsi Sulawesi Selatan untuk mengumpulkan data-data sejarah dan bahan dokumenter lainnya yang tersimpan pada instansi pemerintah kabupaten, lembaga swasta, dan koleksi-koleksi pribadi. Di samping itu, dilakukan pula penelitian terhadap tradisi-

tradisi lisan, sebab pada umumnya masyarakat yang menyimpan tradisi lisan, selalu menuangkan kenyataan sejarah dan landasan kultur kehidupan politik dan sosial mereka dalam bentuk cerita rakyat dan sejenisnya. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari sikap memarjinalkan kenyataan historis yang tidak tertuang dalam naskah *lontarak* dan sumber tertulis lainnya, seperti dokumen dan manuskrip.

Dokumen dan keterangan yang dikumpulkan tersebut, sebelum diinterpretasi dan digunakan dalam penyusunan naskah, dikritik terlebih dahulu untuk memastikan otentitas dan validitasnya. Hal ini dimaksudkan untuk dapat memberikan keterangan dan ulasan yang bermanfaat dan objektif, sehingga hasil yang diperoleh dapat dipercaya dan dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Langkah selanjutnya, adalah melakukan penafsiran terhadap sumber yang telah dikritik atau lulus seleksi sebagai suatu fakta. Penafsiran ini dilakukan dengan jalan merangkaikan berbagai fakta dan memberikan penjelasan terhadap fakta-fakta itu secara maksimal dan objektif. Hal ini dimaksudkan untuk dapat memberikan arti dan makna fakta itu dalam rangka penyusunan naskah hasil penelitian.

Tahapan terakhir dari seluruh rangkaian penelitian ini adalah penulisan naskah hasil penelitian (historiografi) dalam bentuk kisah sejarah yang bersifat deskripsi analitis, tanpa mengabaikan penggunaan bahasa yang baik dan benar. Sehubungan dengan itu, maka persoalan-persoalan yang berkaitan dengan latar belakang ekspedisi militer Belanda dan dinamika perlawanan Kerajaan Suppa serta implikasi sosial yang menyertainya harus dijelaskan faktor-faktor penyebabnya. Berbeda halnya dengan penulisan yang bersifat deskripsi narasi, yang hanya menampilkan gambaran kisah sejarah dalam urutan waktu (kronologis). Biasanya penulisan sejarah yang hanya bersifat deskripsi narasi, tidak dapat menjelaskan hubungan sebab akibat dan konteks situasional yang mengendap di balik fakta-fakta sejarah.

PEMBAHASAN

Sekilas tentang Sawitto

Sawitto juga merupakan salah satu kerajaan di wilayah Ajatappareng yang terletak di pesisir barat bagian utara jazirah selatan Sulawesi yang menghadap ke Selat Makassar. Kerajaan ini berbatasan dengan Binuang (Mandar), Batulappa, dan Kassa di sebelah utara; Rappang, Alitta, Maiwa, Enrekang, dan Sidenreng di sebelah timur; Suppa, Alitta dan Mallusetasi di sebelah selatan; dan Selat Makassar di sebelah barat. Luas kerajaan ini belum diperoleh informasi atau data yang tepat. Namun berdasarkan penafsiran diperkirakan memiliki luas 200 *paal* (1 *paal* = 1.506 m) persegi (Morris, 1890:213-214).⁴ Kerajaan Sawitto terdiri atas sejumlah *wanua* dan daerah *paliliq*:

- a. Daerah Sawitto, yang mencakup ibukota Sawitto dan *wanua* atau kampung Tanreasona, Paserang, Ulutedong, Pacongong, Senga-e, Tallang, Patobong, La Palapo, Uncu-e, Lura-e, Lesetana, Palia-e, Dolangange, Pao, Ruba-e, Sarempo, Awang-Awang Purung, Kacampi, Soro-e, Ulo, Barana, Ka-e, Kanari-e, Labalakang, Ujungnge, Paladange, Salo Poko-e, Gucia, Libukang, Liku, Sulilia, Lalatieng, Bila, Penrang, Lamani, Bonging, dan Totenana.
- b. *Liliq-passeajengeng* atau *vassal* dari persahabatan atau kekerabatan: Tiro-

⁴Menurut D.F. van Braam Morris (1890:214), bahwa Daerah Letta dahulu termasuk persekutuan Masenrempulu. Namun dalam perkembangannya ditaklukkan oleh Bone atas kecerobohnya membunuh utusan Kerajaan Bone sehingga diserang pada tahun 1685. Sebagai wilayah taklukkan, Letta di tempatkan di bawah kekuasaan Bone kemudian diserahkan pengawasannya kepada Sawitto. Letta kemudian melepaskan diri dan kini harus kembali seperti dahulu dianggap sebagai suatu kerajaan merdeka. Daerah ini berpenduduk padat; penduduknya yang terutama hidup dari pertanian, juga bersifat kasar dan mudah tersinggung. Perlu dikemukakan bahwa Raja Letta atas inisiatif sendiri pergi ke Makassar dan bersama Laksamana Speelman membuat sebuah kontrak pada 26 Agustus 1669. Setelah masa ini sebaliknya tidak ada lagi kesepakatan yang dibuat dengan daerah ini dan semuanya bersifat hubungan langsung.

wang, Rangamea atau Jampu-e, Lolo-wang dan Langnga yang semuanya disebut juga empat *bate-bate* (bendera). Selanjutnya Kabalangang, Lome, Kalu-pong, Pangaparang, Kadokong, dan Galangkalang yang seluruhnya disebut *liliq basi* atau enam *lembang*.

- c. *Liliq-no-rakkalana* yang juga disebut *liliq-e-ri-lalang*: Cempa, Madalo, Paria, Talabangi, Urung, Malimpung, Padangkalawa, Kaba, Punia, Peso, Sekang, Bulu, Bua, Salo, Tampio, Paleteang, dan Lempangang.⁵

Sungai-sungai utama di wilayah Sawitto adalah Sungai Jampu-e, Dolangang, Siblo, Wakka, Salipolo, Langnga, Paria, Ruba-e, Lemba-e, dan Binangakaraeng. Sungai-sungai ini merupakan cabang dari Sungai Saddang yang bersumber di Pegunungan Sulawesi Tengah dan Tanah Toraja. Sungai Saddang yang mengalir melewati Tanah Toraja, Masenrempulu, dan Sawitto yang bermuara di Selat Makassar, bukan hanya memiliki kedudukan penting dalam pertanian karena menjadi sumber humus dan air bagi lahan persawahan di lembah-lembah sejumlah anak sungai ini, melainkan juga sebagai jalur perhubungan dan perdagangan bagi sejumlah *wanua* (daerah) atau kampung di Sawitto. Demikian pula Sungai Jampu-e, Paria, dan Binangakaraeng yang mengalami pendangkalan di muaranya, namun dapat dilayari bagi perahu-perahu pribumi kecil sampai jarak seperdua *paal* ke hulu. Sementara sungai-sungai lain hanya

⁵Sementara sumber *lontarak* antara lain menyebutkan bahwa Sawitto *paliligna* \ Tirowang \ Malimpung \ Kabelangngeng \ Loloang \ Lengnga \ Penrang \ Rangamea \ Urung \ Kadokkong \ Galangkalang \ Pangamparang \ Malo \ Lanriseng \ Lerang \ *bab napanoqe rakalanna* \ Kappa \ Punia \ Tanresona \ Buwa \ Bulu \ Sekkang \ Peso \ Soloq \ Paqgeroang \ Paria \ Nampio \ Madelloq \ Paleteang \ Talabangi \ Beulu \ *wanuwa tengnga* \ Lepangngeng *tammatt* \ Rangamea \ *anaq banuwana* \ Penrang \ Lalanting \ Madelloq *tammatt* \ Lengnga \ *anaq banuwana* \ Makuring \ Patobong *tammatt* \ Tiroang \ *anaq banuwana* \ Marawi \ bab Kabelangngeng \ *anaq banuwana* \ Palompe \ *tammatt* (*Lotarak Akkarungeng Sawitto*; Druce, 2009:256-257).

dapat dilayari dengan sampan (perahu). Ketika hujan turun di daerah hulu atau pegunungan, sungai-sungai itu sangat mudah meluap. Muara sungai-sungai itu ditumbuhi dengan mangruf (*kayu bangko*) dan nipah. Pada umumnya di sekitar muara atau aliran sungai itu sangat padat penduduknya. Juga di sekitar aliran sungai-sungai itu terbentang dataran rendah yang luas dan sangat cocok bagi tanaman padi, jagung, dan berbagai jenis lainnya (Morris, 1890:215; Anonim, 1910:61).

Keadaan ekologi yang demikian itu memungkinkan Sawitto menjadi kerajaan yang kaya akan tanah pertanian, baik untuk tanaman padi dan jagung maupun untuk palawija dan umbi-umbian. Pada Januari dan Februari, penggarapan lahan (tanaman padi) dimulai dan panen berlangsung pada Juli dan Agustus. Pada umumnya panen menguntungkan dan bukan hanya memadai untuk konsumsi sendiri, tetapi setiap tahun masih ada beberapa ribu pikul padi yang dibawa ke daerah Mandar dan Massenrempulu. Setelah panen padi, oleh penduduk di dataran dan pegunungan juga banyak menanam jagung. Bahkan daerah ini mengeksport komoditi jagung ribuan pikul per tahun. Selain bahan pangan (padi dan jagung), juga berbagai jenis ubi, kacang, dan *langnga* (wijen) ditanam yang produksinya ratusan pikul per tahun dan yang hampir seluruhnya diekspor (Morris, 1890:216).

Tanaman kelapa terdapat pada semua *wanua* atau kampung dan buah kelapa banyak yang diekspor. Aren, pinang, dan pohon kemiri juga banyak ditanam di Sawitto. Bahkan pinang dan kemiri diekspor dalam jumlah besar setiap tahun. Bambu dijumpai di berbagai kampung. Demikian pula tanaman kapuk ditemukan hampir di semua kampung, tetapi dalam jumlah kecil. Nila hanya ditanam untuk membuat kain dan mengecat warna biru pada baju. Begitu juga *kasumba* untuk memberikan warna coklat muda. Selanjutnya pisang, mangga, pepaya, nangka, jeruk, nanas, dan tebu juga dibudidayakan di Sawitto. Peternakan terdiri atas ayam, kerbau,

kuda, kambing, dan domba.⁶ Penangkapan ikan memegang peranan penting dan memberikan sumber pendapatan yang berlimpah kepada penduduk pantai. Selain menggunakan jaring, juga digunakan alat tangkap berupa *jala* yang dibawa dengan perahu kecil ke laut. Perikanan di sepanjang pantai dikelola dengan menempatkan *bubuh* dan *sero*. Secara rutin setiap tahun beberapa ratus pikul ikan kering atau ikan asin diekspor ke kerajaan-kerajaan di wilayah Masenrempulu.⁷

Puncak gunung utama yang hanya terletak di sebelah utara Sawitto adalah Malimpung, Paleteang dan Kabalangang. Menurut penafsiran ketinggiannya adalah empat ribu kaki. Pada umumnya gunung-gunung ini ditutup dengan pepohonan ringan, tanaman belukar, dan alang-alang. Hutan lebat pada puncak lereng tidak banyak dijumpai. Produk

⁶Menurut Braam Morris bahwa kerbau dikembang biakkan dalam jumlah besar dan setiap tahun diangkut ke Sidenreng dan Wajo. Juga kerbau liar di dalam hutan dan pegunungan dijumpai. Di sana-sini peternakan milik keluarga raja dan bangsawan mencapai jumlah 10 sampai 50 ekor kuda, tetapi yang berukuran sedang. Ekspor kuda tidak terjadi. Kambing dan domba juga banyak ditanakkan, sedikit untuk ekspor dibandingkan yang dipotong pada kesempatan pesta. Ayam dijumpai di setiap daerah yang berpenduduk dan dijual dengan harga sangat murah (Morris, 1890:216-217).

⁷Selain itu, penduduk juga membuat kerajinan yang terbatas pada penenunan sarung dan baju tradisional. Menganyam keranjang dan tikar kasar dari daun pandan dan lontar. Juga pembuatan keris, badik, tombak, dan peralatan pertanian tradisional dari besi lainnya. Pembuatan sampan dan perahu-perahu kecil lain. Dari daun kual dan rumbiya (sejenis kelapa) karung beras dan kopi serta tikar kajang dibuat dan beberapa ribu kodi diekspor setiap tahun. Dari getah yang diperoleh tunas bunga daun aren, gula coklat dibuat yang banyak diperdagangkan di pasar. Beberapa pandai emas dijumpai di sini, tetapi keterampilan mereka masih perlu dibenahi. Pertukangan besi dikerjakan oleh sejumlah orang, sementara setiap tukang kayu yang memadai bisa membantu dalam membangun rumah-rumah penduduk yang sangat primitif. Suatu usaha pertukangan kayu khusus tidak ditekuni. Juga orang menjumpai pembuat tembikar, yang sangat bagus buatan pot, gumbang, dan kendinya. Tetapi pembuatan tembikar ini sangat murah. Juga jala dan peralatan menangkap ikan lainnya dikerjakan oleh penduduk (Morris, 1890:218).

hutan hanya terdiri atas kayu yang cocok bagi pembangunan rumah pribumi dan pembuatan perahu tradisional, seperti juga dari jenis bambu dan rotan yang berkualitas rendah. Sementara itu, angin timur dan tenggara biasanya mulai berhembus pada Juni sampai akhir November. Pada masa perubahan musim hujan deras banyak turun, tetapi kebanyakan pada peralihan dari musim kemarau ke musim hujan. Kondisi alam dan hasil produksi penduduk tentu sangat berpengaruh pada perdagangan di Sawitto. Jaringan perdagangannya meliputi Makassar, Speermunde, dan Mandar melalui perahu-perahu pribumi, dan dengan Masenrempulu dengan kuda-kuda pikul.⁸

⁸Komoditi impor utama adalah kain Eropa, bahan-bahan kain, baju, barang-barang besi, tanah dan tembaga, peralatan rumah tangga, candu, gambir, minyak, dan garam. Komoditi ekspor terdiri atas padi, jagung, *langnga*, kelapa, kemiri, buah pinang, karung beras dan karung kopi, tikar kajang, ikan kering dan ikan asin serta gula merah. Setiap tahun kota-kota Pantai Jampu-e, Langnga, Sadapolong, Paria, dan Binangakaraeng dikunjungi sekitar 80 perahu dagang dari Makassar, Speermunde, dan Mandar. Dalam wilayah Massenrempulu, banyak padi, ikan, garam, dan kain dipasarkan yang diangkut melalui sarana kuda pikul dari Sawitto. Cukai ekspor hanya dipungut dari padi, sapiri, *langnga* sebesar f ½ dan dari jagung f ¼ per pikul, sementara dari setiap kuda yang dibebani dengan muatan dibayarkan f ¼ sebagai cukai. Pasar selama 7 hari diadakan di Lapalapo, Bulu, Paleteang, Lesetana, Ka-e, Amasangang, Paria, Langnga dan Jampu-e. Jumlah perahu yang ada di Sawitto ditafsirkan sebanyak 60 perahu dagang dan 80 perahu nelayan. Sebagai mata uang, orang menggunakan jenis logam seperti ringgit, gulden, ½ gulden, dan ¼ gulden. *Dubbeltjes* dan sen tidak disukai. Uang ayam yang di sini disebut *doi manu* atau *doi nipi*, merupakan alat pembayaran umum yang menurut kursnya dinaikkan antara 960 sampai 1050 keping per ringgit. Orang memperhitungkan dan mengukur dengan *vadem (rappa)*, *lere* = 1 ½ elo, siku, *lama* (rentang tangan). Sebagai ukuran bobot di kota-kota pantai hanya digunakan *jating* (dengan kapasitas berbeda-beda), sementara sebagai ukuran isi di kota pantai dan pasar-pasar pedalaman digunakan *kadaro* (tempurung kelapa yang keras). Untuk barang basah, sebagai ukuran digunakan botol, cangkir kecil dan banyak tabung bambu (Morris, 1890: 216 dan 219).

Latar Belakang Perlawanan

Pemerintah Hindia Belanda semakin menaruh perhatian atas pulau-pulau yang berada di luar Pulau Jawa dan Madura menjelang abad ke-20. Perhatian itu tidak saja semata-mata berlandaskan pada kepentingan ekonomi, tetapi juga dilandaskan pada kepentingan politik. Pemerintah Hindia Belanda merasa perlu untuk lebih dalam menanamkan kekuasaannya di daerah-daerah di luar Pulau Jawa, karena ada kekhawatiran bahwa daerah-daerah itu kelak akan melakukan hubungan dengan kekuasaan asing lainnya.⁹ Jika hal itu terjadi, maka dapat dipastikan bahwa Belanda akan menemukan kesulitan untuk membangun satu kesatuan politik di wilayah kolonialnya. Sehubungan dengan itu, pemerintah Belanda menginginkan agar terlebih dahulu melakukan penguasaan politik atas daerah-daerah yang berada di luar Jawa. Untuk maksud itu, pemerintah Belanda harus melakukan satu tindakan militer, utamanya terhadap kerajaan-kerajaan yang selama ini dianggap berbahaya. Karena itu, tanpa penguasaan pada bidang politik, adalah satu hal yang mustahil untuk dapat menguasai bidang ekonomi.¹⁰

Perluasan pengaruh dan wilayah kekuasaan pemerintah Belanda melalui tindakan militer untuk menaklukkan kerajaan-

⁹Akibat Revolusi Industri yang dimulai di Inggris, bangsa Barat mulai memperluas wilayah pengaruhnya. Meskipun pada awalnya bangsa-bangsa Barat itu melakukan dasar tidak campur tangan atas daerah-daerah yang berada di luar kekuasaannya, namun hal itu kemudian tampaknya mulai berubah ketika dipandang perlu untuk menanamkan kekuasaan yang lebih dalam pada bidang politik untuk menguasai ekonomi. Hal ini dapat dilihat dari Dasar Tidak Campur Tangan Inggris di Malaysia kemudian berubah ketika kepentingan ekonomi dipandang mendesak (Poelinggomang, 2005:13 dan 21).

¹⁰ Ada tiga alasan utama mengapa pemerintah Hindia Belanda memutuskan untuk memperluas wilayah kekuasaannya: (1) menciptakan keamanan untuk menarik pemodal asing menanamkan modalnya di daerah ini, (2) menguasai daerah-daerah yang dari segi ekonomi berpotensi untuk maju, dan (3) mencegah adanya pengaruh luar yang ingin menanamkan kekuasaannya di daerah ini (Pelinggomang, 2005:14).

kerajaan yang berdaulat itu dikenal dengan “politik pasifikasi” (*pacificatie politiek*). Secara harafiah, politik pasifikasi berarti politik perdamaian. Namun demikian, di balik kebijakan itu ternyata adalah bagaimana menguasai secara langsung seluruh wilayah Hindia Belanda yang telah dipandang secara *de jure* berada dalam kekuasaan pemerintah Belanda, tetapi secara *de facto* sejumlah kerajaan masih dinyatakan merdeka dan berdaulat. Itulah sebabnya pelaksanaan politik pasifikasi itu diikuti dengan tindakan pengiriman pasukan ekspedisi militer untuk menaklukkan kerajaan-kerajaan yang masih merdeka dan berdaulat yang dalam konsep pemerintahan kolonial diberi status kerajaan sekutu (Poelinggomang, 2005:14).

Kebijakan tersebut berpengaruh pula terhadap kerajaan-kerajaan di Sulawesi Selatan yang berada di bawah kekuasaan pemerintah Hindia Belanda dengan sebutan “Pemerintahan Sulawesi dan Daerah Bawahannya” (*Gouvernement Celebes en Onderhoorigheden*). Dalam kenyataannya, wilayah ini belum sepenuhnya dikuasai oleh Belanda. Hubungan politik dengan kerajaan-kerajaan di wilayah ini masih dapat dipilah dalam tiga kategori.¹¹ Salah satu

¹¹Kategori pertama adalah negeri-negeri yang dikuasai dan diperintah secara langsung yang disebut “wilayah pemerintahan” (*gouvernement landen*). Pada dasarnya negeri-negeri ini diduduki pada waktu Perang Makassar (1666-1669) dan diperintah secara langsung. Negeri-negeri yang masuk kategori ini adalah Distrik Makassar (*District van Makassar*), Distrik-distrik Bagian Utara (*Noorder Districten*) yang meliputi daerah Maros dan Pangkajene, Distrik-distrik Bagian Selatan (*Zuider Districten*) yang meliputi Bantaeng, Bulukumba, dan Selayar. Pelaksanaan pemerintah di wilayah ini diemban sepenuhnya oleh pejabat pemerintahan yang berkebangsaan Belanda (Sumber Arsip, 1973:263). Kategori kedua adalah wilayah kekuasaan yang tidak diperintah secara langsung. Pelaksanaan pemerintahan dipinjamkan kepada penguasa lokal yang menyelenggarakan pemerintahan atas nama pemerintah Hindia Belanda. Oleh karena itu disebut “kerajaan pinjaman” (*leen vorstendom*). Dalam hubungan ini penguasa lokal tetap melaksanakan pemerintahan secara tradisional. Kerajaan-kerajaan yang masuk kategori ini berubah setelah Perang Makassar. Sebab, kerajaan-kerajaan yang dijadikan kerajaan pinjaman adalah kerajaan-kerajaan yang setelah perang masih dikategorikan sebagai

di antaranya yang sering menimbulkan konflik adalah kerajaan-kerajaan sekutu yang sering juga disebut *bondgenootschappelijke landen*. Berdasarkan Perjanjian Bungaya (1667), kerajaan sekutu dinyatakan berkedudukan sebagai kerajaan yang merdeka dan berdaulat, tetapi harus menempatkan penguasa Belanda sebagai “pelindung dan perantara”. Hal inilah yang sering menimbulkan konflik antara penguasa lokal dengan pemerintah Belanda. Bagi penguasa lokal, pernyataan kerajaan yang merdeka dan berdaulat menunjukkan pengakuan dari pihak pemerintah Belanda terhadap kedudukan kerajaan-kerajaan dalam derajat kesetaraan status. Sementara pengakuan atas kedudukan pemerintah Belanda sebagai pelindung dan perantara itu menempatkan dirinya sebagai protektorat terhadap kerajaan-kerajaan sekutu. Itulah sebabnya campur tangan pihak pemerintah Belanda dalam hubungan antar kerajaan, pemilihan dan pengangkatan penguasa baru, sering dipandang sebagai usaha untuk menganeksasi sehingga menimbulkan konflik antara kedua belah pihak.¹²

Kenyataan itulah yang menyebabkan pemerintah Hindia Belanda di Makassar pada 1900, mulai menyebarkan informasi kepada kerajaan-kerajaan sekutu bahwa kebijakan

“kerajaan sekutu” (*bondgenootschappelijke landen*), tetapi dalam proses perkembangannya melakukan perlawanan sehingga diduduki dan dikuasai. Namun karena kekurangan tenaga sehingga pelaksanaan pemerintahan tetap diemban kepada pemerintah lokal. Kerajaan-kerajaan yang tergolong kategori ini antara lain Kerajaan Wajo, Tallo, Parepare, Tanete, dan Bone. Kategori ketiga adalah kerajaan-kerajaan sekutu (*bondgenootschappelijke landen*).

¹²Kerajaan-kerajaan yang tetap berstatus sebagai kerajaan sekutu hingga awal abad ke-20, antara lain Gowa, Soppeng, Luwu, Barru, Konfederasi Ajatappareng (Sidenreng, Sawitto, Suppa, Rappeng, dan Alitta) Konfederasi Massenrempulu (Maluwa, Alla, Batulappa, Buntubatu, Enrekang, Kassa, dan Maiwa), Konfederasi Mandar (Balanipa, Sendana, Majene, Pamboang, Tappalang, Mamuju, dan Persekutuan *Pitu Ulunna Salu*), Konfederasi Mallusettasi (Soreang, Bacokiki, Bojo, Nepo, dan Palanro), Sanrobone, Buton, dan kerajaan lainnya yang tidak tergolong dalam wilayah kekuasaan langsung dan kerajaan pinjaman.

“pelabuhan bebas” akan dihapuskan,¹³ dan kepada mereka akan dibebankan uang ganti rugi atas pungutan pajak impor-ekspor, cukai, pajak pelabuhan, pajak jangkar, dan ketentuan-ketentuan lain yang menyangkut pelayaran dan perdagangan. Ganti rugi itu pada dasarnya merupakan langkah politik untuk menegaskan bahwa wilayah kerajaan-kerajaan di daerah ini berada di bawah kekuasaan pemerintah Belanda. Tentu saja kerajaan-kerajaan itu menolak kebijakan tersebut karena akan melenyapkan sumber pendapatan dan wilayah kekuasaan mereka. Sikap kerajaan-kerajaan itulah yang antara lain menyebabkan kebijakan pelabuhan wajib pajak di Makassar tertunda pelaksanaannya.¹⁴

¹³Makassar dinyatakan sebagai pelabuhan bebas mulai 1 Januari 1847 dan berubah menjadi pelabuhan wajib pajak mulai pada 1 Agustus 1906. Patut dikemukakan bahwa ketika pemerintah Hindia Belanda ingin membatalkan kedudukan Makassar sebagai pelabuhan bebas pada 1872, banyak pihak beranggapan bahwa kebijakan itu pasti merugikan kedudukan ekonomi pemerintah karena pelaut dan pedagang dari Sulawesi Selatan yang ketika itu dipandang memainkan peranan penting dalam dunia perdagangan maritim akan mengalihkan kegiatan mereka ke bandar niaga asing, khususnya Singapura, Penang, dan bandar-bandar di Semenanjung Melayu. Peran penting mereka itu berkaitan dengan penguasaan perdagangan produksi laut yang sangat dibutuhkan oleh pedagang Eropa untuk menjalin perdagangan mereka dengan Cina, penghasil produksi teh yang sangat laris di Eropa (Poelinggomang, 2002:90).

¹⁴Salah satu kerajaan yang menentang kebijakan itu, ialah Bone. Kendati pun Gubernur Sulawesi sendiri yang menginformasikan rencana tersebut dengan berkunjung langsung ke kerajaan itu. Kemudian masih dijelaskan lagi oleh residen yang ditempatkan di Bone (Surat Gubernur tertanggal 19 Maret 1900). Sebab-sebab lain tertundanya pelaksanaan kebijakan wajib pajak di Makassar; *Pertama*, menurut hasil penelitian Vermeulen (1896) dan laporan Gubernur Sulawesi, Gerrit W.W.C. Baron Koevell (1898-1903) pada 1900, bahwa penduduk Sulawesi Selatan memegang peran penting dalam kegiatan niaga di wilayah Kepulauan Hindia Belanda bagian timur. Kedua laporan ini menyebabkan pemerintahan meragukan keterangan bahwa kebijakan pelabuhan wajib pajak hanya akan mengurangi volume perdagangan di Makassar sebesar 22 persen. *Kedua*, kerajaan-kerajaan bumiputera dapat memblokir pelayaran penduduk ke bandar niaga pemerintah.

Sehubungan dengan itu, Gubernur Sulawesi, C.A. Kroesen, memberikan pertimbangan kepada pemerintah pusat di Batavia (surat tertanggal 11 Februari 1904) untuk melakukan tindakan militer terhadap kerajaan-kerajaan yang menentang kebijakan pelabuhan wajib pajak.¹⁵ Itulah sebabnya ketika Joannes Benedictus van Heutsz tampil menggantikan Willem Roosenboom (1899-1904) sebagai Gubernur Jenderal Hindia Belanda pada 1 Oktober 1904, ia mulai mencanangkan suatu kebijakan untuk menguasai secara langsung seluruh wilayah Hindia Belanda. Van Heutsz memberikan label kebijakannya itu yang secara halus disebut sebagai politik perdamaian (*pacificatie politiek*). Sesungguhnya kebijakan ini dirancang untuk menguasai sepenuhnya atas wilayah Hindia Belanda, termasuk Sulawesi Selatan.

Pemerintah Hindia Belanda segera mengalihkan perhatiannya ke Sulawesi Selatan untuk menyelesaikan segala hambatan yang dihadapinya, termasuk dalam merealisasikan kebijakan wajib pajak. Menteri Koloni memberikan saran bahwa apabila perundingan dengan kerajaan-kerajaan berdaulat tentang jumlah ganti rugi tidak terselesaikan, ia tidak melihat “motif untuk menyudahi perundingan penyelesaian berbagai kesulitan yang dihadapi dengan mereka” (Sumber Arsip Financien No. 706). Mengikuti pernyataan Menteri Koloni tersebut, Gubernur Jenderal Joannes B. Van Heutsz (1904-1909), dalam suratnya kepada

Ketiga, diperkirakan pendapatan dari kerajaan-kerajaan bumiputera tidak dapat dipenuhi. *Keempat*, kerajaan-kerajaan bumiputera dapat mengembangkan bandar niaga mereka untuk bersaing dengan bandar niaga pemerintah sehingga muncul perdagangan gelap. *Kelima*, kerajaan-kerajaan bumiputera dapat meningkatkan hubungan politik dan ekonomi dengan negara asing sehingga mengancam kedudukan politik dan ekonomi pemerintah (Poelinggomang, 2002:90-91).

¹⁵Kroesen menyarankan untuk melakukan tindakan militer, serupa dengan yang dilakukan di Aceh. Tindakan militer itu terutama terhadap Bone dan Luwu, karena kedua kerajaan ini memiliki pengaruh kuat di Sulawesi Selatan dan gigih menentang kebijakan ganti rugi pemungutan pajak (Kroesen, 1906:11; Harvey, 1989:46).

Direktur Departemen Keuangan (tertanggal 25 Januari 1905), menyatakan bahwa sesuai dengan keinginan Menteri Koloni, maka secepat mungkin dilakukan kontrak dengan penguasa kerajaan-kerajaan berdaulat di wilayah Sulawesi Selatan untuk mengambil alih hak pajak perdagangan, dan semua yang berkaitan dengan masalah tersebut, serta segera mempersiapkan agar pelaksanaan pemungutan pajak perdagangan dapat dilaksanakan pada 1 Januari 1906. Direktur Departemen Keuangan, dalam pertimbangan dan sarannya, menyatakan bahwa demi menjamin kepentingan perdagangan maka kerajaan-kerajaan berdaulat di daerah ini harus bersedia mengakui hak pemerintah Belanda untuk memungut pajak perdagangan di wilayah kekuasaan mereka (Poelinggomang,2002:92).

Kegagalan perundingan yang mereka alami, mendorong Gubernur Jenderal Van Heutzs mencanangkan politik pasifikasi dengan langkah-langkah militer. Untuk mewujudkan kebijakan itu, dipersiapkanlah suatu pasukan ekspedisi militer, guna menaklukkan dan memaksa kerajaan-kerajaan yang menolak memenuhi tuntutan yang diajukan oleh pemerintah Belanda. Gubernur Sulawesi C.A. Kroesen mengajukan kepada Van Heutzs pada April 1905, agar dilakukan tindakan penaklukan terhadap sejumlah kerajaan di Sulawesi Selatan. Sebab, mereka dianggap gagal memenuhi kewajiban menurut perjanjian atau dianggap telah melanggar perjanjian yang sudah ditanda-tangani, termasuk Sawitto suatu kerajaan di Ajatappareng yang bangkit menentang kekuasaan pemerintah Hindia Belanda (Kroesen,1906:11; Harvey,1989:47).

Menanggapi usulan itu, Gubernur Jenderal Van Heutzs dalam pertimbangan dan sarannya, menyatakan bahwa ia tidak yakin pelanggaran yang dilakukan itu dapat dijadikan alasan untuk menaklukkan, tanpa peringatan terlebih dahulu. Oleh karena itu, Van Heutzs memperingatkan bahwa harus bersikap hati-hati agar tidak memancing timbulnya perlawanan atau menghindari kesan bahwa pemerintah Belanda hanya mencari-cari alasan untuk

menguasai secara langsung seluruh Sulawesi Selatan. Lebih lanjut Van Heutzs menyatakan bahwa tindakan militer yang pertama harus dilakukan terhadap Bone karena dianggap sebagai “kerajaan yang paling kuat dan yang paling berbahaya” (Harvey,1989:48). Gubernur C.A. Kroesen setuju tindakan militer yang pertama dilakukan terhadap Bone. Karena selain kerajaan paling kuat dan berbahaya, juga karena “sikapnya yang kurang ajar”.¹⁶

Kenyataan itu mendorong Van Heutzs untuk segera melaksanakan kebijakan (*pacificatie politiek*) dengan tindakan militer di Sulawesi Selatan. Dalam suratnya kepada Gubernur Sulawesi C.A. Kroesen tertanggal 14 Juli 1905, tampak jelas keinginan dari pemerintah Hindia Belanda untuk melakukan tindakan penaklukan dan menguasai secara langsung seluruh Sulawesi Selatan. Pada intinya, surat itu berisi perintah kepada gubernur untuk memaksa semua penguasa atau raja-raja di daerah ini agar menyerahkan kekuasaan pemerintahannya, yaitu tunduk, patuh, dan taat sepenuhnya kepada pemerintah Belanda dengan menandatangani *korte verklaring* (pernyataan pendek) dalam waktu yang singkat.¹⁷ Rumusan *korte verklaring* tersebut, dipengaruhi oleh

¹⁶Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa Bone sesungguhnya berstatus sebagai kerajaan pinjaman, namun menolak tuntutan yang diajukan oleh pemerintah Belanda untuk menguasai Pelabuhan BajoE dan Pallime. Menurut Kroesen bahwa demi menegakkan dan mempertahankan kewibawaan pemerintah Hindia Belanda, dan untuk melaksanakan perubahan-perubahan yang diperlukan dalam hubungan dengan para penguasa bumiputra, serta persetujuan terhadap tuntutan-tuntutan yang diajukan oleh pemerintah Hindia Belanda harus dipaksakan, kalau perlu dengan kekerasan (Kroesen,1906:10).

¹⁷*Korte Verklaring* terdiri dari tiga pasal, yakni pasal satu memuat pernyataan menyerahkan wilayah kekuasaan kepada pemerintah Hindia Belanda dan menyatakan kesetiaan dan ketaatan kepada pemerintah Belanda dan perwakilannya di Hindia Belanda. Pasal dua, memuat janji untuk tidak melakukan hubungan dengan kerajaan asing, musuh pemerintah juga menjadi musuhnya dan sahabat pemerintah menjadi sahabatnya. Pasal tiga, mengakui dan menjalankan semua perintah dan peraturan yang dibuat oleh pemerintah (Sommer,1934; Poelinggomang,2004:46).

perubahan kebijakan politik berdasarkan Pidato Tahta (*Troom Rede*) Ratu Belanda pada 1901. Hal inilah yang menjadi landasan Politik Etis di Hindia Belanda sekaligus pernyataan diplomatis untuk membenarkan penguasaan terhadap kerajaan-kerajaan di Sulawesi Selatan (Poelinggomang,2002:92; Harvey,1989:46).

Berkaitan dengan hal tersebut tidak berlebihan jika Dirk Fock, yang kemudian menjadi Gubernur Jenderal Hindia Belanda (1921-1926), menyatakan bahwa ekspedisi militer tersebut dilakukan karena para raja atau penguasa dari kerajaan-kerajaan di Sulawesi Selatan tidak mentaati perjanjian dan bersikap tidak adil terhadap rakyatnya, dan sejumlah kerajaan ditambahkan tuduhan sebagai tempat pelarian para pencuri dan dedengkot penadah barang curian (Kol,1911:300). Sementara menurut Cramer, pemerintah Belanda berkewajiban melakukan tindakan bersenjata karena bertanggung jawab atas kepulauannya (Kol,1911:301). Pernyataan-pernyataan itu seakan-akan membenarkan tindakan militer yang dilancarkan pemerintah Belanda sebagai tugas suci untuk mengadakan perbaikan, memajukan, dan memasalahkan penduduk bumiputra seperti rumusan Politik Etis Kabinet A. Kuiper pada 1901 (Poelinggomang,2002:93).

Gambaran tersebut menunjukkan bahwa kebijakan politik pasifikasi hanyalah sebuah kedok. Hal ini tampak dari tuntutan yang diajukan kepada penguasa kerajaan-kerajaan di Sulawesi Selatan. Misalnya, mereka dituntut untuk menandatangani penyerahan wilayahnya kepada pemerintah Belanda, menyetujui ganti rugi penarikan pajak ekspor dan impor, serta mengakui hak pemerintah Belanda untuk menguasai pelabuhan kerajaan dan menempatkan polisi di pelabuhan itu (Kielstra,1910:357). Karena tuntutan itu ditolak sehingga pemerintah Belanda segera memerintahkan persiapan pemberangkatan pasukan pendudukan atau ekspedisi militer untuk menaklukkan kerajaan yang tidak bersedia memenuhi tuntutan yang diajukan. Ekspedisi militer Belanda yang kemudian dikenal

dengan *Zuid Celebes Expeditie 1905* (Ekspedisi Militer Sulawesi Selatan 1905) itu, mendapat perlawanan dari kerajaan-kerajaan di Sulawesi Selatan, termasuk Sawitto.

Dinamika Perlawanan Sawitto

Dalam mewujudkan kebijakan perluasan wilayah kekuasaan, pemerintah Hindia Belanda mempersiapkan pasukan militer untuk melakukan penyerangan terhadap kerajaan-kerajaan yang tidak bersedia memenuhi tuntutan yang diajukan, yaitu menandatangani pernyataan pendek (*korte verklaring*). Salah satu kerajaan di Sulawesi Selatan yang menolak *korte verklaring* adalah Sawitto. Oleh karena Addatuang Sawitto La Tamma,¹⁸ bukan hanya menolak tuntutan yang diajukan oleh pemerintah, tetapi juga tidak bersedia menjalin kerjasama dengan pemerintah Belanda. Hal ini bermula ketika terjadi peristiwa di Jampue pada awal 1905, yaitu perselisihan antara I Kasong Karaeng Allu¹⁹ dengan Daeng Mogontang.²⁰ Sesungguhnya perselisihan itu dilatari oleh persaingan dalam mengontrol perdagangan di Pelabuhan Jampue. Meskipun mendapat

¹⁸Setelah Addatuang Sawitto, Palawagau Arung Pattojo wafat pada 5 September 1902, terjadi konflik internal di kalangan istana dalam suksesi kepemimpinan atau penentuan pengganti Addatuang Sawitto. Namun atas bantuan Residen J.A.G. Brugman yang dikirim ke Sawitto, dewan hadat Sawitto berhasil memilih putra sulung almarhum Arung Pattojo yang bernama La Tamma menjadi Addatuang Sawitto pada 10 Desember 1902. Pada hari yang sama Addatuang La Tamma menandatangani perjanjian (*akta van verband*) yang kemudian disetujui dan disahkan oleh pemerintah Hindia Belanda pada 2 Juli 1903 (Anonim,1910:75).

¹⁹I Kasong Karaeng Allu adalah putra Tomailalang Towa Kerajaan Gowa dan sepupu satu kali dengan Raja Gowa I Makkulau Karaeng Lembangparang. Ia mengawini putri Arung Jampue (La Pamasangi), salah seorang anggota dewan hadat Sawitto yang sangat berpengaruh (Anonim,1910:77)

²⁰Daeng Magontang adalah bangsawan asal Sawitto yang menjadi pimpinan perompak dan sering ke daerah Toraja melakukan penangkapan orang untuk dijual sebagai budak. Ia menempatkan basis perompakan dan perdagangan budak di Pelabuhan Jampue dan Minanga Karaeng (Anonim,1910:78).

dukungan dan bantuan dari Sawitto, Suppa, dan Alitta, tetapi Karaeng Allu tidak berhasil menumpas perompakan dan menghentikan perdagangan budak yang dilakukan Daeng Magontang di Jampue (Anonim,1910:77)

Kegagalan tersebut mendorong Karaeng Allu meminta bantuan secara langsung kepada Raja Gowa I Makkulau Karaeng Lembangparang, tanpa persetujuan dari pemerintah Hindia Belanda. Atas permintaan itu, raja Gowa mengirimkan bantuan pasukan sebanyak 400 orang dan 100 di antaranya bersenjata senapan. Pasukan bantuan ini di bawah pimpinan Karaeng Bontonompo dan kedua putra raja Gowa, yaitu La Panguriseng Arung Alitta dan La Mappanyukki Daru Suppa. Mereka berangkat melalui laut dengan menggunakan perahu pada 21 Februari 1905 dan tiba di Jampue dua hari berikutnya. Karena itu, pemerintah Belanda segera mengirimkan pasukan bersenjata sebanyak 45 orang tentara di bawah pimpinan Residen Brugman untuk mencegah terjadinya pertempuran di Jampue. Pasukan Belanda berhasil menyita lima perahu dan menangkap 150 pasukan Gowa bersama tiga orang pemimpinnya. Mereka segera dikembalikan ke Makassar dan sebagai tebusan pemerintah Belanda meminta uang pembebasan sebanyak 10.800 gulden (Anonim,1910:78; Arfah,1993:84).

Jika dicermati lebih jauh tentang peristiwa di Jampue dan perkembangan selanjutnya, maka tampak bahwa pemerintah Belanda berusaha “memancing di air yang keruh”, sebab peristiwa itu dijadikan sebagai salah satu alasan untuk melancarkan serangan terhadap Sawitto dan Gowa. Demikian pula terhadap pemberantasan perompak, perdagangan gelap, dan perdagangan budak, tampaknya hanya kedok belaka, sebab pemerintah Belanda seharusnya tidak mencegah pasukan Gowa yang hendak membantu Karaeng Allu dalam menumpas aktivitas Daeng Magontang di Jampue. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa persoalan perompakan dan perdagangan budak hanya merupakan alasan bagi pemerintah

Belanda untuk menguasai Pelabuhan Jampue dan keterlibatan Sawitto dan Gowa dalam peristiwa di Jampue dijadikan alasan untuk menaklukkan kedua kerajaan tersebut.

Campur tangan pemerintah Hindia Belanda dalam persoalan di Jampue, memicu terjadinya konflik dengan kerajaan-kerajaan di wilayah Ajatappareng, terutama Sawitto, Suppa, Alitta. Terlebih setelah ketiga kerajaan itu memutuskan secara sepihak dan mengembalikan kontrak politik kepada pemerintah Belanda pada 18 Mei 1905. Tindakan serupa juga dilakukan oleh Maiwa, salah satu kerajaan yang tergabung dalam persekutuan Massenrempulu. Oleh karena itu, kerajaan-kerajaan tersebut sudah tidak lagi terikat perjanjian dengan pemerintah Belanda, yang sebelumnya mereka dianggap sebagai sekutu. Namun tindakan itu menjadi salah satu alasan bagi pemerintah Belanda melakukan tindakan militer untuk menaklukkan Sawitto dan kerajaan lainnya di Ajatappareng. Itulah sebabnya pemerintahan Hindia Belanda mengirimkan pasukan ekspedisi militernya ke Sawitto dengan sasaran pendaratan di Pantai Jampue pada 1905 (Anonim,1910:78; Arfah, dkk.1996:119).

Kehadiran pasukan Belanda di Pantai Jampue itu, memicu semangat perlawanan Sawitto secara terbuka. Laskar Sawitto, Alitta, Suppa, dan Arung Jampue senantiasa mempersiapkan diri dalam menyambut atau memberikan perlawanan terhadap serangan yang dilancarkan oleh pasukan Belanda. Sejak itu, konflik atau permusuhan antara rakyat Sawitto yang dipimpin oleh Addatuang La Tamma bersama kelompok aristokrat lainnya dengan pemerintah Belanda semakin meningkat. Itulah sebabnya La Tamma memanggil pulang putranya, yaitu La Sinrang untuk memimpin perlawanan terhadap Belanda. La Sinrang kemudian diangkat menjadi Panglima Perang Kerajaan Sawitto. Berkat keberanian dan kepemimpinannya dalam perlawanan menentang kekuasaan pemerintah Belanda, ia kemudian mendapat gelar dari masyarakat

dengan *Bakka Lolona Sawitto* atau *Petta Lolo La Sinrang*” (Side,1992:63; Ibrahim,1996:53).

Sejak La Sinrang diangkat menjadi panglima perang, ia segera memerintahkan kepada anak buahnya yang terdiri dari ribuan laskar rakyat, untuk memperkuat pertahanan di pesisir Pantai Jumpue. Pertahanan itu dimaksudkan untuk membendung serangan pasukan Belanda yang melakukan pendaratan. Dalam waktu singkat, ribuan laskar rakyat dari Sawitto, Suppa, Alitta, dan sekitarnya yang dilengkapi dengan persenjataan tradisional berupa badik, tombak, kanjai, keris, golok, bambu runcing, dan senapan “*rilocco*” (sejenis bedil) sudah siap menunggu pendaratan pasukan Belanda. Selain itu, La Sinrang juga membentuk pasukan khusus yang kemudian dikenal dengan nama “*passiuno*”, yaitu pasukan berani mati yang tak kenal mundur atau menyerah (Ibrahim,1996:51; Side,1992:71).

Untuk memperkuat kubu pertahanan laskar Sawitto, La Sinrang membentuk pula pasukan *passiuno* pada setiap kampung yang dianggap strategis dan masing-masing dipimpin oleh seorang *toloq* (pemberani). Pemimpin dari masing-masing kampung tersebut, diberi gelaran yang sesuai dengan nama ayam jantan yang terkenal dari masing-masing kampung bersangkutan. Adapun nama-nama pimpinan dari Sawitto dan sekitarnya yang terkenal adalah *Calabai Tungke’na* Alitta, *Koro-korona Madello*, *Balibina* Kabellangeng, *Bori-borona Palleteang*, *Bilulang Rakkona* Lome, *Koro Pessena* Lalabata, *Cambang Balelena* WanuaE, dan *Bulu Sirua’na* Suppa (Latif, 2012: 288; Arfah, dkk. 1996:101; Side,1992:72).

Armada pasukan Belanda dengan kekuatan sekitar 20 buah perahu dengan jumlah pasukan sekitar 600 orang lengkap dengan senjata, baik senjata ringan maupun berat mendarat di Pantai Jumpue pada akhir September 1905. Residen Brugman segera mengirim utusan dan ultimatum kepada Addatuang Sawitto La Tamma pada 29 September 1905, agar bersedia menandatangani pernyataan pendek (*korte verklaring*) yang diajukan. Dengan ancaman bahwa jika Addatuang Sawitto tidak

bersedia menandatangani pernyataan pendek yang diajukan tersebut, maka akan ditaklukkan melalui tindakan militer. Namun ancaman dari pasukan Belanda itu, tidak menyurutkan semangat perlawanan laskar Sawitto. Bahkan tawaran itu mendapat penolakan mutlak, sehingga pasukan Belanda dikerahkan untuk melakukan penyerangan terhadap kubu pertahanan laskar Sawitto (Arsip Kolonial Verslag,1905; Anonim,1910:79; Arfah, dkk. 1996: 102).

Meskipun laskar Sawitto memberikan perlawanan atas serangan itu, namun pasukan Belanda berhasil menerobos pertahanan musuhnya di pesisir Pantai Jumpue. Oleh karena itu, laskar Sawitto mundur secara teratur untuk melanjutkan perjuangan dan mengatur strategi perlawanan dengan sistem perang gerilya, yaitu menyerang musuh di saat lengah dan mundur di saat musuh menyerang. Dengan mundurnya laskar Sawitto, pasukan Belanda berhasil menduduki Jumpue, sehingga terbukalah jalan bagi pasukan Belanda untuk melancarkan serangan lebih lanjut ke pusat kerajaan. Namun ketika pasukan Belanda mencoba melancarkan serangan ke pusat kerajaan untuk menangkap Addatuang Sawitto, pasukan pengawal (*passiuno*) La Tamma bersama laskar yang dipimpin oleh La Sinrang memberikan perlawanan, sehingga terjadilah pertempuran di Tanra Assona pada awal Oktober 1905 (Anonim,1910:79).²¹

Pasukan Belanda yang berhasil mendesak mundur laskar Sawitto di Tanra Assona, berusaha melanjutkan penyerangan terhadap kubu pertahanan laskar Sawitto, sehingga kembali terjadi pertempuran di Labumpung (Ponnia).

²¹Pada pertempuran itu, pasukan *passiuno* berjumlah sekitar 250 orang dan memiliki senjata api sekitar 20 pucuk serta dilengkapi dengan peralatan perang lainnya, yaitu berupa tombak, pedang, keris dan lain-lain serta mendapat dukungan dari laskar Suppa, Alitta, dan Jumpue, sehingga pertempuran sengit antara kedua belah. Pasukan *passiuno* La Sinrang, yang mengandalkan keberanian dan semangat yang pantang menyerah dapat mengimbangi pasukan militer Belanda yang memiliki persenjataan lengkap dan modern (Ibrahim,1996:53; Arfah,1998:103).

Berkat keberanian dan semangat perlawanan laskar Sawitto, mereka berhasil membendung gerak maju atau berhasil mematahkan serangan yang dilancarkan oleh pasukan militer Belanda di Labumpung (Padu, 1971:4; Munta, 1989:45). Meskipun demikian, laskar Sawitto secara berturut-turut memindahkan kubu pertahanannya di Labumpung, Rubbae, Alitta untuk melanjutkan perlawanan dengan strategi perang gerilya yaitu mengadakan perlawanan sambil berpindah dari suatu tempat yang satu ke tempat yang lain. Setelah mengadakan perlawanan atau pertempuran di suatu tempat, misalnya di Ulu Tedong, Pajalele, Paletang, dan Malimpung, mereka segera meninggalkan tempat itu dan kemudian menyusun kekuatan baru di tempat lain. Taktik dan strategi yang demikian tersebut, cukup merepotkan pasukan militer Belanda, sehingga pemerintah Belanda semakin meningkatkan kekuatannya untuk menghadapi laskar Sawitto.

Perang gerilya yang dilancarkan oleh laskar Sawitto dalam menentang kekuasaan pemerintah Hindia Belanda, semakin memuncak setelah ekspedisi militer Belanda berhasil menaklukkan Bone (Beddungolo, 2011:85).²² Sebab strategi pemerintah Belanda dalam melakukan penaklukan terhadap kerajaan-kerajaan di Sulawesi Selatan melalui ekspedisi militer, terlebih dahulu memuatkan perhatian pada kerajaan yang dianggap terkuat, baru menyusul kemudian terhadap kerajaan-kerajaan kecil yang dianggap lemah dan mudah dikuasai. Itulah sebabnya setelah Bone berhasil ditaklukkan, pemerintah Belanda semakin meningkatkan kegiatan pasukan militernya di Parepare. Hal ini dimaksudkan untuk mencegah atau mengalihkan perhatian kerajaan-kerajaan di wilayah Ajatappareng, agar mereka tidak

²²Seperti yang disebutkan sebelumnya bahwa Kerajaan Bone dijadikan sebagai sasaran pertama dari ekspedisi militer Belanda ketika itu, karena merupakan kerajaan yang paling kuat dan paling berbahaya diantara kerajaan-kerajaan yang ada di Sulawesi Selatan. Selain itu, juga karena sikapnya dianggap “kurang ajar” yang menolak untuk mengakui pelaksanaan penguasaan pemerintahan Hindia Belanda atas Pelabuhan Bajoe dan Pallime (Amir, 2003:86; Kroesen, 1906).

membantu Sawitto dalam perseteruan dengan pemerintah Belanda di Sulawesi Selatan.

Setelah sejumlah kerajaan berhasil ditaklukkan, sebagian pasukan Belanda dikerahkan untuk melakukan penaklukan terhadap Sawitto. Sebab, laskar Sawitto di bawah pimpinan La Sinrang sejak awal 1905, telah melakukan perlawanan terhadap pemerintah Belanda. Namun, karena taktik dan strategi perang gerilya yang diterapkan, sehingga belum berhasil ditundukkan oleh pasukan Belanda. Terlebih setelah diperoleh kabar yang dapat dipercaya sekitar awal Desember 1905, bahwa Raja Gowa Sultan Husain bersama pengikut-pengikutnya telah berada di Alitta dan menjalin kerjasama dengan laskar Sawitto. Hal ini bukan hanya semakin mengobarkan semangat juang laskar Sawitto, melainkan juga telah berhasil memikat rakyat Alitta, Suppa, dan Jampue, dalam mengobarkan perlawanan terhadap pasukan Belanda. Oleh karena La Mappanyukki yang senantiasa mendampingi ayahnya (Raja Gowa Sultan Husain), baik dalam pengungsian maupun dalam pengejaran pasukan militer Belanda, adalah sebagai Datu Suppa. Sedangkan saudaranya La Panguriseng sebagai Arung Alitta (Arfah, dkk. 1996: 122; Mattulada, 1998:386).

Kenyataan itu mendorong pemerintah Belanda semakin meningkatkan jumlah pasukannya untuk menangkap raja Gowa bersama para pengikutnya. Peningkatan itu juga dimaksudkan untuk menghadapi perlawanan Sawitto. Oleh karena Letnan Christoffel yang memimpin pasukan militer Belanda dalam pengejaran terhadap La Sinrang bersama pasukannya di Sawitto, berhasil mengetahui bahwa raja Gowa bersama para pengikutnya telah bekerja sama dan bergabung dengan laskar Sawitto.²³ Selain itu, juga sejumlah pasukan atau laskar dari Bone yang tidak sudi menyerah

²³Permaisuri Raja Gowa Sultan Husain yang bernama We Tenri Paddanreng Arung Alitta, adalah sepupu La Tamma Addatuang Sawitto. Dengan demikian, maka La Sinrang mempunyai hubungan kekeluargaan dengan raja Gowa, yaitu sebagai kemenakan dari Permaisuri raja Gowa (Kadir, 1984:53; Amir, 2007:157).

kepada musuh, menggabungkan diri ke dalam laskar Sawitto dalam perlawanan terhadap pasukan Belanda. Itulah sebabnya pasukan Belanda di bawah pimpinan Letnan Christoffel yang melakukan gerakan pengejaran terhadap La Sinrang dan raja Gowa bersama para pengikutnya, tidak sedikit terlibat pertempuran dengan laskar Sawitto bersama sekutunya. Di antaranya pertempuran pada 21 Desember 1905, ketika pasukan Belanda berhasil mengepung raja Gowa bersama pengikutnya di dekat Bukero dalam daerah Alitta. Sementara itu laskar Sawitto senantiasa pula memberikan bantuan dan berusaha menembus kepungan pasukan Belanda, sehingga terjadi pertempuran antara kedua belah pihak di Bukero, antara Tisei dan Sidenreng (Arfah,1993:92; Amir, 2007: 158).

Pertempuran di Bukero tersebut, mengakibatkan duka yang mendalam bagi pasukan raja Gowa khususnya dan laskar Sawitto pada umumnya. Sebab, La Panguriseng Arung Allitta, Karaeng Allu, dan tujuh belas orang dari pasukan mereka gugur dalam peristiwa itu. Sementara saudara raja Gowa yang bernama I Mangimangi Karaeng Bontonompo tertembak oleh musuh dan terluka parah pada bagian kakinya. Oleh karena itu, ia tidak dapat meloloskan diri dan akhirnya tertangkap serta ditawan oleh pasukan militer Belanda. Selain itu, pasukan militer Belanda juga berhasil merampas dua pucuk *achterlader*, satu pucuk *revolver*, dan 6.000 peluru, serta dua ton kecil mesiu. Sedangkan di pihak pasukan militer Belanda, dua orang mengalami luka-luka, yaitu Maijer dan De Costa. Namun Raja Gowa Sultan Husain, dan putranya La Mappanyukki, serta La Sinrang berhasil meloloskan diri (Patunru,1983:105; Arfah, dkk. 1996:124-125).

Meskipun raja Gowa bersama para pengikutnya berhasil meloloskan diri dari kepungan pasukan Belanda di Bukero. Namun mereka tetap diikuti terus oleh pasukan Belanda. Pada malam 24, menjelang dini hari 25 Desember 1905, pasukan Belanda berhasil mengepung kembali raja Gowa bersama para pengikutnya di Warue dalam daerah Sidenreng,

sehingga terjadilah pertempuran sengit antara kedua belah pihak. Laskar Sawitto di bawah pimpinan La Sinrang berhasil membuka jalan, sehingga raja Gowa masih sempat lolos dari kepungan pasukan Belanda. Pada pertempuran itu, dua orang pengawal raja Gowa gugur sebagai kusuma bangsa dan di pihak musuh seorang sersan Belanda yang bernama van De Krol tertembak mati. Sementara raja Gowa tertembak dan terluka pada bagian perutnya, namun ia masih dapat meloloskan diri dari kepungan pasukan Belanda.²⁴

La Mappanyukki dan La Sinrang bersama laskar Sawitto meneruskan perjuangannya melalui taktik dan strategi perang gerilya. Mereka melancarkan atau melakukan serangan mendadak terhadap pos-pos pertahanan pasukan militer Belanda pada setiap ada kesempatan, dan setelah itu mereka lalu menghilang ke hutan-hutan di pegunungan. Pada 6 Januari 1906, mereka melancarkan serangan mendadak terhadap pasukan Belanda di Sawitto, sehingga terjadi pertempuran antara kedua belah pihak. laskar Ajatappareng dengan pasukan militer Belanda yang menelan korban jiwa di kedua belah pihak yang tidak sedikit. Pada pertempuran itu, tidak sedikit laskar Sawitto yang gugur. Demikian pula di pihak musuh, salah seorang perwira pimpinan pasukan

²⁴Raja Gowa Sultan Husain yang pengunduran diri dalam keadaan gelap gulita dan terluka parah, sehingga Baginda hilang keseimbangan dan terperosok serta jatuh ke dalam jurang yang dalam. Di dalam jurang itulah Sultan Husain, gugur sebagai kusuma bangsa dalam perjuangan mempertahankan kehormatan bangsa dan negerinya. Beberapa hari kemudian, pihak pemerintah Hindia Belanda mengaku berhasil menemukan jenazah raja Gowa di dalam jurang. Almarhun kemudian diangkut ke Perepare dan selanjutnya dibawa ke Makassar. Gubernur Sulawesi, selanjutnya menyerahkan jenazah Baginda ke keluarganya yang berada di Jongaya. Jenazah Baginda, sebelum dimakamkan di pekuburan raja-raja Gowa di Tamalate, terlebih dahulu disembahyangkan di Masjid Jongaya. Itulah sebabnya Raja Gowa Sultan Husain, kemudian diberi gelar anumerta oleh masyarakat "*Tu Menanga ri Bundu'na*, yang bermakna orang yang gugur atau meninggal dalam peperangannya (Mattulada,1998:386-387; Arfah, dkk. 1996: 26; Amir,2007:162; Kadir,1984:54).

Belanda yang bernama Kapten De Gruyter tewas (Abduh,1985:131; Munta,1989:50).

Selanjutnya, pasukan Belanda di bawah pimpinan Letnan Kolonel van Bennekom, melancarkan serangan ke Alitta karena memperoleh berita bahwa La Sinrang bersama laskar Sawitto sedang berada di Alitta. Namun serangan itu menemui kegagalan, karena La Sinrang bersama pasukannya telah meninggalkan daerah itu beberapa saat sebelum pasukan Belanda tiba di Alitta. Dalam perkembangannya La Sinrang bersama pasukannya, sering muncul secara tiba-tiba di daerah lain dan melancarkan serangan secara mendadak terhadap patroli dan pos-pos pertahanan pasukan Belanda sehingga terjadi sejumlah pertempuran antara kedua belah pihak. Peristiwa itu antara lain pertempuran di Leppangeng, Bulu, Lerang-lerang, Langga, dan bahkan sampai ke Maiwa dan Enrekang (Persekutuan Massenrempulu). Di daerah yang terakhir disebutkan inilah terjadi pula pertempuran sengit antara laskar Sawitto di bawah pimpinan La Sinrang dengan pasukan Belanda di bawah pimpinan Kapten Hamakers yang sedang mengadakan operasi ke Maiwa (Arfah, dkk. 1996:127; Abduh, 1985:132).

Perlawanan yang tidak kunjung padam itu, mendorong pemerintah Belanda terpaksa mengerahkan sebagian besar pasukannya untuk melumpuhkan perlawanan laskar Sawitto. Pada 21 Januari 1906, pasukan Belanda di bawah pimpinan Kapten Goldman menyerang Malimpung karena mendengar kabar bahwa La Sinrang bersama pasukannya sedang berada di Malimpung. Serangan itu ternyata sia-sia karena La Sinrang telah meninggalkan Malimpung beberapa saat sebelum pasukan Belanda tiba. Dari Malimpung pimpinan laskar Sawitto bersama pasukannya menuju ke daerah Tiroang, sementara pasukan Belanda mengikutinya terus hingga ke Tiroang. Di Tiroang pasukan Belanda tiba-tiba diserang oleh laskar Sawitto, sehingga terjadilah pertempuran antara kedua belah pihak di daerah itu. Pada pertempuran tersebut, beberapa orang menjadi korban, baik di pihak

pasukan Belanda maupun di pihak laskar Sawitto (Side, 1992:80; Arfah,dkk.1996:128).

Tanggal 8 Maret 1906 malam, markas pasukan Belanda di Lannga di serang oleh laskar Sawitto di bawah pimpinan La Sinrang dengan kekuatan sekitar 80 orang. Pada malam itu, laskar Sawitto yang dipimpin oleh La Muhammad (Puanna Pokke), La Punggu (Puanna Pannekke), Puanna Kula, Ambo Mau, dan Ambo Pati berhasil menerobos masuk ke dalam markas pasukan Belanda. Dengan semangat perjuangan yang membara serta didasari oleh prinsip "*lebbi mui matewe naiya naparenta Balandae*" (artinya: lebih baik mati dari pada dijajah oleh Belanda). Sebelum mereka melancarkan serangan dan menerobos masuk ke dalam markas musuh, terlebih dahulu mereka mengadakan "*si talli*", yaitu perjanjian untuk selalu bersama, yang berbunyi sebagai berikut "*rilasa bulo mallebu allane*" (dikebiri dengan buluh bundar/sejenis bambu bagi yang lari). Namun dalam peristiwa itu, mereka tidak dapat mengalahkan pasukan Belanda karena tiga orang pemimpin laskar Sawitto, yaitu La Muhammad dan La Punggu serta seorang lagi tidak diketahui namanya gugur secara kesatria di dalam markas pasukan Belanda (Abduh,1985:132; Arfah,dkk.1996:129).

Meskipun demikian, laskar Sawitto terus melancarkan perang gerilya. Berkali-kali mereka melakukan penyerangan terhadap pos-pos pertahanan pasukan Belanda. Mereka juga sering menyerang pasukan *mobile colonne* yang melakukan patroli, sehingga musuh benar-benar kewalahan menghadapi perlawanan laskar Sawitto. Bahkan ketika pasukan *mobile colonne* di bawah pimpinan Kapten van Hasselt yang sedang mengadakan patroli diserang secara mendadak oleh laskar Sawitto, sehingga terjadi pertempuran antara kedua belah pihak di Lannga pada 24 Maret 1906. Pada peristiwa itu, Kapten Van Hasselt terbunuh. Oleh karena itu, usaha pemerintah Belanda untuk melumpuhkan perlawanan laskar Sawitto dengan cara kekerasan atau operasi militer ternyata tidak berhasil. Itulah sebabnya pemerintah Belanda menempuh cara-cara lain, yaitu berusaha

membujuk dan merayu dengan janji-janji manis terhadap para pemimpin-pemimpin laskar Sawitto, agar menghentikan perlawanannya dan berbagai usaha lainnya (Munta,1989:52; Abduh,1985:133).

Selain melancarkan operasi militer, pemerintah Belanda juga menyebarkan maklumat yang berisi tentang usaha penangkapan terhadap La Sinrang. Bagi mereka yang berhasil menangkap hidup atau mati, akan diberi hadiah, baik berupa uang maupun berupa pangkat dan kedudukan yang terhormat dalam pemerintahan. Namun, bujukan dan rayuan tentang janji-janji itu tidak membuahkan hasil. Sedangkan bagi mereka yang menyembunyikan atau mendukung perjuangan La Sinrang, pemerintah Belanda akan mengambil tindakan tegas dengan ancaman hukuman mati, penjara, kerja paksa, dan diasingkan. Mereka juga melancarkan politik pecah belah atau adu domba di kalangan bangsawan dan para komandan laskar Sawitto. Sasaran utamanya bukan hanya ditujukan terhadap Addatuang Sawitto bersama kelompok aristokratnya, melainkan juga terhadap para komandan tempur laskar Sawitto (Munta,1989:54; Side,1992:83).

Pengaruhnya memang hebat karena di dalam kalangan istana Sawitto misalnya, timbul pertentangan, ada yang pro dan ada pula yang kontra terhadap perjuangan melawan Belanda. Bagi mereka yang pro menginginkan perlawanan diteruskan hingga tetesan darah terakhir atau sampai Belanda benar-benar angkat kaki dari bumi pertiwi khususnya di Sawitto. Sedangkan bagi mereka yang kontra menganggap bahwa perlawanan tidak banyak berarti dalam melawan pasukan Belanda yang mempunyai perlengkapan militer yang jauh lebih kuat. Selain itu, mereka juga melihat kenyataan dan keadaan rakyat yang semakin merosot kesejahteraannya. Jika perlawanan itu terus berkelanjutan tanpa memperhitungkan hasil yang bermanfaat bagi rakyat, maka lama kelamaan kesejahteraan rakyat akan lebih merosot lagi dan lebih menderita serta tidak menutup kemungkinan akan musnah di tangan

pasukan militer Belanda (Ibrahim, 1996:57; Side,1992:78).

Pro dan kontra terhadap perjuangan melawan pasukan Belanda tersebut, merupakan kesempatan baik bagi pemerintah Belanda untuk mematahkan semangat perlawanan rakyat Sawitto yang dipimpin oleh La Sinrang. Oleh karena itu, pemerintah Belanda semakin berusaha untuk membujuk para pemimpin pasukan agar menghentikan perlawanannya. Usaha itu pun pada mulanya mengalami kegagalan, tetapi lama kelamaan akhirnya beberapa orang pemimpin laskar La Sinrang menyerahkan diri kepada pasukan Belanda. Sedangkan bagi mereka yang tidak mau menyerah, tetap melanjutkan perlawanan sehingga banyak di antara mereka yang gugur dan tidak sedikit yang tertangkap oleh pasukan Belanda. Hal ini semakin melemahkan perlawanan Sawitto. Namun, sebelum kunci utamanya, yaitu La Sinrang menyerah atau ditangkap, semangat perlawanan rakyat Sawitto dianggap belum berhasil dipadamkan (Mattulada, 1998:388; Abduh,1985:133).

Setelah berbagai cara dilakukan untuk melumpuhkan perlawanan rakyat Sawitto mengalami kegagalan, Addatuang Sawitto La Tamma yang sudah berusia lanjut ditangkap oleh pemerintah Belanda pada 25 Juli 1906. Demikian pula istri La Sinrang (Makkanyuma) ditangkap oleh pemerintah Belanda. Kedua orang kesayangan La Sinrang itu, diancam akan diasingkan ke daerah pembuangan yang menyengsarakan apabila La Sinrang tidak mau menyerah. Oleh karena itu, La Sinrang bersama sisa-sisa pasukannya masuk ke Pinrang untuk membebaskan Addatuang Sawitto dan istrinya. Pada saat itulah La Sinrang dikepung dan kedua orang kesayangannya yang disandera atau ditahan dijadikan perisai oleh pemerintah Belanda. Dengan ancaman bahwa jika La Sinrang tidak bersedia menyerah, maka kedua orang kesayangannya akan dibunuh. Demi kelangsungan Kerajaan Sawitto dan keselamatan rakyat banyak serta keselamatan jiwa kedua orang kesayangannya tersebut,

akhirnya La Sinrang berhasil ditangkap oleh pemerintah Belanda pada 10 Juni 1906 (Anonim,1910:79; Mattulada, 1998:388).²⁵

Sesungguhnya terdapat sejumlah versi mengenai proses penangkapan La Sinrang. Namun yang jelas bahwa setelah ayah (Addatuang Sawitto La Tamma) dan istrinya (Makkanyuma) tertangkap, akhirnya La Sinrang pun ditangkap oleh pemerintah Belanda. Peristiwa itu dikisahkan pula dalam *lontarak*, di antaranya *Lontarak Akkarungeng Alitta*, sebagai berikut:

“Belanda tidak dapat menaklukkan Sawitto di bawah pimpinan La Sinrang Petta Lolo, yang digelar dengan Bakka Lolona Sawitto. Jadi Belanda mengancam ayahnya La Sinrang yang bernama La Tamma Addatuang Sawitto dibawa ke Parepare diancam bahwa kalau tidak datang menyerah La Sinrang, maka La Tamma Addatuang Sawitto yang harus dibawa ke daerah Jawa.

Maka bermohonlah La Tamma kepada anaknya agar menyayangi orang tuanya, maka turunlah La Sinrang dari tempat persembunyiannya untuk berunding, tetapi beliau diangkut ke Jawa, barulah dibebaskan La Tamma, nanti pada tahun 1937 M, baru dikembalikan La Sinrang.²⁶

²⁵Sumber lain menyebutkan bahwa setelah Addatuang Sawitto ditangkap oleh pasukan Belanda, ia segera memanggil Anre Guru La Nennung untuk menyampaikan pesan kepada La Sinrang. Isi pesan tersebut, adalah: (1) Agar La Sinrang segera menghentikan perlawanannya terhadap Belanda, karena pihak Belanda tidak mungkin dapat dihadapi. Apabila La Sinrang terus mengadakan perlawanan akibatnya adalah Addatuang Sawitto akan dibuang ke Jawa. (2) Jika La Sinrang ternyata tidak mau menghentikan perlawanannya, maka supaya La Sinrang membuat benteng setinggi rumah dan Addatuang Sawitto bersama Belanda akan menghadapinya. Oleh karena itu, La Sinrang bersama pasukannya melaporkan diri pada pemerintah Belanda di Pinrang pada akhir Juli 1906 (Munta,1989:56).

²⁶*Naiyatosi Sawitto apak deknauillei Balandae panganroi La Sinrang Petta Lolo, ritellak e Bakkalolona Sawitto. Jaji ambokna La Sinrang napakatauk-tauk iyanaritu alena La Tamma Addatuang Sawittonalaling lao*

Sumber lain menyebutkan bahwa ketika istri La Sinrang yang bernama Makkanyuma ditangkap Belanda, kemudian menyusul La Tamma ayah kandung La Sinrang. Keduanya kemudian dijebloskan ke dalam penjara. Tidak lama setelah berita penangkapan itu diketahui oleh La Sinrang, sehingga ia membulatkan tekad masuk Pinrang. Masuk Pinrang bukan untuk menyerah, tetapi berusaha membebaskan istri dan orang tuanya dari tahanan. Pihak pasukan militer Belanda mengetahui bahwa La Sinrang berada di dalam kota, serentak mengadakan pengepungan ketat. Kepungan semakin rapat, dan La Sinrang sulit untuk meloloskan diri. Pada kesempatan itulah pemerintah Belanda berhasil menangkap hidup-hidup La Sinrang (Ibrahim,1996:58).

Penangkapan La Sinrang berimplikasi terhadap perlawanan Sawitto, meskipun sejumlah pemimpin pasukan atau anak buah La Sinrang tetap melanjutkan perlawanan. Untuk melumpuhkan dan mematahkan semangat perlawanan anak buahnya, pemerintah Belanda kemudian mengasingkan La Sinrang ke Banyumas (Jawa Timur). Pengasingan La Sinrang ke tempat pembuangan yang menyengsarakan, bukan hanya menandai berakhirnya perlawanan Sawitto, melainkan juga telah melapangkan jalan bagi pemerintah Belanda untuk menguasai secara langsung Sawitto. Oleh karena pemerintah Belanda mulai menata dan menanamkan pengaruh serta kedudukan kekuasaan di Sawitto. Suatu hal yang menarik mengenai pengakuan pemerintah Belanda setelah melancarkan ekspedisi militer di Sulawesi Selatan bahwa pada awalnya rakyat lebih menyukai meninggalkan desa-desa atau kampung halaman mereka daripada menyerah kepada pemerintah Belanda (Harvey,1989:51;

ri Pare-pare,napodanngi Addatuang Sawitto makkedae narekkodek i LaSinrang manganro. Addatuang Sawitto sellei rilaling lao ri tana Jawa.

Aga nassurona Addatuang Sawitto ri anaknasarekkua-mmennngi manennngi ambokna nanokna La Sinrangpole ri bulu e manganro, narilalinna lao ritana Jawa, nappatoni ri paleppek Addatuang Sawitto La Tamma, nakkomani ri taung 1937 M. Naripalisu La Sinrang (Lontarak Akkarungeng Alitta).

Arfah,1993:95).

PENUTUP

Perlawanan Sawitto terhadap pemerintah Hindia Belanda pada awal abad ke-20, bukan hanya dilatari oleh penolakan Sawitto terhadap kebijakan pelabuhan wajib pajak, bahwa semua pelabuhan diwajibkan membayar cukai impor, ekspor, dan cukai pelabuhan kepada Belanda. Melainkan juga karena campur tangan pemerintah kolonial Belanda terhadap urusan dalam negeri Kerajaan Sawitto. Selain itu, juga karena pemerintah Belanda bermaksud menguasai secara langsung Kerajaan Sawitto. Hal ini ditandai dengan diajukannya suatu tuntutan kepada Sawitto, agar tunduk, taat, dan patuh sepenuhnya kepada pemerintah kolonial Belanda dengan menandatangani pernyataan pendek (*korte verklaring*). Karena tuntutan itu ditolak dengan tegas, sehingga pemerintah Belanda mengirimkan ekspedisi atau pasukan militernya untuk menaklukkan Sawitto dan kerajaan-kerajaan di Sulawesi Selatan yang menolak *korte verklaring*.

Serangan militer yang dilancarkan oleh pemerintah kolonial Belanda tersebut, memicu terjadinya konflik berupa perang terbuka antara laskar Sawitto dengan pasukan Belanda pada 1905-1906. Meskipun laskar Sawitto memberikan perlawanan sengit atas serangan militer Belanda itu, tetapi pada akhirnya mereka berhasil dikalahkan oleh pasukan Belanda. Atas kekalahan itu, Sawitto dan kerajaan-kerajaan lainnya di wilayah Ajatappareng harus menerima kenyataan tunduk di bawah kekuasaan pemerintah kolonial Belanda dengan menandatangani pernyataan pendek (*korte verklaring*). Walaupun demikian, perlawanan rakyat Sawitto mempunyai makna penting dalam sejarah perjuangan bangsa, khususnya dalam perlawanan menentang kekuasaan pemerintah kolonial Belanda. Sebab, bukan hanya merupakan suatu fakta bahwa usaha pemerintah Belanda dalam memperluas wilayah kekuasaannya di Sawitto, senantiasa mendapat perlawanan dari

laskar Sawitto di bawah pimpinan Addatuang Sawitto La Tamma dan La Sinrang. Melainkan juga merupakan suatu bukti bahwa semangat perjuangan rakyat Sawitto dalam menentang kekuasaan Belanda, tetap berkobar hingga awal abad ke-20. Oleh karena itu, perlawanan rakyat Sawitto yang mempunyai makna historis tersebut, patut direnungkan dan dipahami di dalam membangun kekinian dan hari esok kita.

DAFTAR PUSTAKA

- Abduh, Muhammad. 1985. *Sejarah Perlawanan Terhadap Imperialisme dan Kolonialisme di Sulawesi Selatan*. Jakarta: Depdikbud.
- Abdullah, Taufik. 1985. *Sejarah Lokal di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Amir, Muhammad. 2003. *Perlawanan Bone Terhadap Belanda Tahun 1905*. Makassar: Eramedia.
- Amir, Muhammad. 2007. *I Makkulau Sultan Husain Profil Patriot Yang Konsekuen Hingga Tetesan Darah Terakhir*. Makassar: Eramedia.
- Anonim, 1910. Nota van Toelichting bij de Korte Verklaring Geteekend en Beeedigd door den Adatoewang en de Hadatsleten van het Landschap Sawito op 27 sten Mei 1908, dalam *Tijdschrift voor Indische Taal-,Land-en Volkenkunde (TBG) Jilid LII*.
- Arfah, Muhammad. 1993. *Biografi Pahlawan Andi Mappanyukki Sultan Ibrahim Profil Nasionalis dan Patriotik Sejatai yang Konsekuen Terhadap Republik Indonesia*. Ujung Pandang: Depdikbud.
- Arfah, Muhammad, dkk. 1996. *Biografi Pahlawan: La Sinrang Bakka Lolona Sawitto Petta Lolo La Sinrsang*, Makassar: Ujung Pandang: Depdikbud.
- Arsip Kolonial Verslag over het jaar 1905. *Celebes en Onderhoorigheden*. Jakarta: Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI).
- Arsip NIT, No.110. Koleksi Badan Arsip dan Perpustakaan Provinsi Sulawesi Selatan.

- Beddungolo, Mahira. 2011. "Perlawanan Bone Terhadap Kolonialisme Belanda Tahun 1905". Makassar: Tesis Pascasarjana Universitas Negeri Makassar.
- Patunru, Abdul Razak Daeng. 1983. *Sejarah Gowa*. Makassar: Yayasan Kebudayaan Sulawesi Selatan Tenggara.
- Patunru, Abdurrazak Daeng. 1989. *Sejarah Bone*. Ujung Pandang: Yayasan Kebudayaan Sulawesi Selatan.
- Patunru, Abdurrazak Daeng. 2004. *Bingkisan Panturu: Sejarah Lokal Sulawesi Selatan*. Makassar: Pusat Kajian Indonesia Timur bekerjasama dengan Lembaga Penerbitan Universitas Hasanuddin.
- Druce, Stephen C. 2009. *The Lands West of the Lakes: A History of the Ajatappareng Kingdoms of South Sulawesi 1200 to 1600 CE*. Leiden: KITLV.
- Edward H. Carr. 1986. *What is History ?* Harmondsworth: Penguin Books.
- Garraghan, Gilbert J. 1957. *A Guide to Historical Method*. New York: Fordam University Press.
- Gottschalk, Louis 1986. *Mengerti Sejarah* (Diterjemahkan Nugroho Notosusanto). Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Harvey, Barbara Sillars. 1989. *Pemberontakan Kahar Muzakkar: Dari Tradisi ke DI/TII*. Jakarta: Grafiti.
- Ibrahim, Syarifuddin. 1996. *Mengenal Sejarah Perjuangan La Sinrang Bakka Lolona Sawitto Petta Lolo La Sinrang*.
- Kadir, Harun, dkk. 1984. *Sejarah Perjuangan Kemerdekaan Republik Indonesia di Sulawesi Selatan*. Ujung Pandang: Kerjasama Bappeda Tk. I Prop. Sulawesi Selatan dengan Unhas.
- Kartodirdjo, Sartono. 1992. *Pendekatan Ilmu Sosial Dalam Metodologi Sejarah*. Jakarta: Gramedia.
- Kemp, P.H. van der. 1910. *De Teruggave der Oost Indische Kolonien 1814-1816: Naar Oorspronkelijke Stukken*. 's-Gravenhage: Martinus Nijhoff.
- Kielstra, E. B. 1910. *Indisch Nederlandsch Geschiedkundige Schetsen*. Haarlem: De Erven F. Bohn.
- Kol, H. Van. 1911. *Nederlandsch-Indie in de Staten Generaal 1897-1909*. s'Gravenhae: Martinus Nijhoff.
- Kroesen, C. A. 1906. *Memori van Overgave van het Bestuur Over het Gouvernement Celebes en Onderhoorigheden*. Jakarta: Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI).
- Latif, Abd. 2012. "Konfederasi Ajatappareng 1812-1906: Sejarah Sosiopolitik Orang Bugis di Sulawesi Selatan". Bangi: Disertasi Fakultas Sains Sosial dan Kemanusiaan Universiti Kebangsaan Malaysia.
- Lontarak Akkarungeng Sawitto. Koleksi Yayasan Kebudayaan Sulawesi Selatan dan Tenggara.
- Lontarak Akkarungeng Alitta. Koleksi Yayasan Kebudayaan Sulawesi Selatan dan Tenggara.
- Lontarak Akkarungeng Suppa. Koleksi Yayasan Kebudayaan Sulawesi Selatan dan Tenggara.
- Mattulada. 1998. *Sejarah, Masyarakat, dan Kebudayaan Sulawesi Selatan*. Makassar: Hasanuddin University Press.
- Morris, D.F. van Braam. 1890. Nota van Toelichting op het Contract Gesloten met het Landschap Sawieto (Adjatararang) op den 30 Sten Oktober 1890, dalm *Tijdschrift voor Indische Taal-, Land-en Volkenkunde (TBG) Tahun 1893, Jilid XXXVI*.
- Munta, Andi Pengerang, dkk. 1989. *Sejarah Lahirnya Kabupaten Daerah Tingkat II Pinrang*. Pinrang: Pemda TK.II Pinrang.
- Notosusanto, Nugroho, 1978. *Masalah Penelitian Sejarah Kontemporer*. Jakarta: Idayu.
- Padu, Hasim. 1971. *Riwayat Perjuangan La Sinrang*. Pinrang.
- Poelinggomang, Edward L. 2002. *Makassar Abad XIX Studi Tentang Kebijakan Perdagangan Maritim*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia (KPG).

- Poelinggomang, Edward L. 2004. *Perubahan Politik dan Hubungan Kekuasaan Makassar 1906-1942*. Yogyakarta: Ombak.
- Poelinggomang, Edward L. 2005. *Sejarah Sulawesi Selatan Jilid I*. Makassar: Balitbangda Provinsi Sulawesi Selatan.
- Side, Syarifuddin. 1992. "La Sinrang Tokoh Pejuang Sawitto 1875-1938: Suatu Analisa Historis". Ujung Pandang: Skripsi Sarjana Unhas.
- Sjamsuddin, Helius. 2007. *Metode Sejarah*. Yogyakarta; Ombak.
- Somer, J. M. 1934. *De Korte Verklaring*. Breda: Corona.
- Sumadi, Suryabrata. 1992. *Metode Penelitian*. Jakarta: Rajawali Press.
- Sumber Arsip. 1905. Rapport van het Departement van oorlog No. 1/VII, bijlagen: Afschrift dagboek van Collonne Helderling van met 23 October tot en met 26 October 1905. Jakarta: Arsip Nasional Nasional Republik Indonesia (ANRI).
- Sumber Arsip. 1973. *Ikhtisar Keadaan Politik Hindia Belanda Tahun 1839-1848*. Djakarta: Penerbitan Sumber-Sumber Sejarah Arsip Nasional Republik Indonesia, No. 5.
- Swart, H.N.A. 1908. "Memorie van Overgave" (Agustus 1906-Mei 1908). Jakarta: Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI).

